



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DADANG AHMAD RIFA'I
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
3. NHK : 76314

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.890.919.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /21 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 129.003.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m ² /80 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 856.410.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m ² /45 m ² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 55.096.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m ² /45 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 814.410.000		
5. Tanah Seluas 750 m ² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	251.000.000
1. MOBIL, KIJANG INNOVA Q A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	154.216.499
D. SURAT BERHARGA	Rp.	51.042.196
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.096.798.845
F. HARTA LAINNYA	Rp.	322.726.719
Sub Total	Rp.	4.766.703.259
III. HUTANG	Rp.	10.720.527
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.755.982.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.